



PEMIMPIN HARUS DEWASA

Konflik terbuka antara Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas'ud dengan sang wakil, Hamdam Pongrewa dinilai sebagai cermin pemimpin tak dewasa. Perselisihan itu menggambarkan konflik kepentingan di dalam pemerintahan. Masyarakat jangan sampai menjadi korban.

PERSELISIHAN antara Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud dan Wakil Bupati, Hamdam Pongrewa sebenarnya sudah tercium sejak lama. Indikasi itu terbaca setidaknya dari berbagai insiden. Misalnya, dalam berbagai kegiatan pemerintah daerah, AGM lebih banyak menugaskan Sekretaris Kabupaten, Muliadi, dibandingkan mengutus sang wakil.

■ Baca Pemimpin.. Hal 2



Dari Barang Branded, Perhiasan, sampai Solar

SATU SISI



SABARUDDIN PANRECALLE
NET
SABARUDDIN Panrecalle selfie di depan monumen kemenangan Paris, Arc De Triomphe.

Traveling Itu Kebutuhan

RYAN AMANTA

satusisi.disway@gmail.com

MELANCONG itu bukan saja bagian dari hobi. Tapi sebuah kebutuhan. Setidaknya hal itu yang dirasakan Sabaruddin Panrecalle. Wakil Ketua DPRD Balikpapan periode 2019-2024 itu memang hobi traveling sejak muda.

■ Baca Travelling.. Hal 3

Tuduhan penipuan yang dalamatkan pada Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud terus menggelinding. Bahkan, penyidik bakal melayangkan panggilan kedua, setelah panggilan pertama tak dipenuhi.

KEPALA Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda, Komisaris Andika Dharma Sena mengatakan, dalam waktu dekat tim penyidik segera memanggil terlapor, Hasanuddin Mas'ud untuk dimintai keterangan.

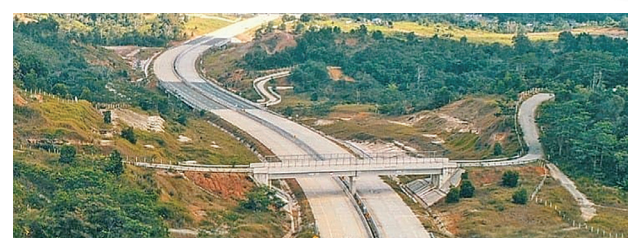
"Sekarang ini masih kami lengkapi dulu (barang bukti), masih kami cek juga 'cek palsu' yang dilaporkan itu," jelasnya, singkat.

Sambil menanti perkembangan penyidikan, Irma Suryani menggelar konferensi pers di kediamannya, Jumat (12/8) menjelang tengah malam.

Didampingi penasihat hukumnya, Jumintang Napitupulu, Irma Suryani menjelaskan secara runut sengketa itu. Ia mengaku terpaksa mengambil jalur hukum. "Saya sudah sabar menunggu masalah utang - piutang ini diselesaikan. Pada tahun 2017 saat cek giro diberikan oleh dia, ternyata tidak bisa dicairkan," ungkap Irma di kediamannya, Jalan S. Parman, Sungai Pinang, Samarinda.

■ Baca Dari.. Hal 3

IRMA Suryani dan cek kosong yang menjadi barang bukti.



PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JBS) mengumumkan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) telah tersambung seratus persen. Pengoperasian secara penuh dilakukan setelah peresmian.

Rampung.. Tol Balsam Siap Dioperasikan

BALIKPAPAN - PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda (JBS) mengumumkan pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) telah rampung

dan siap dioperasikan. Progres pembangunan konstruksi jalan di seksi I dan seksi V dikatakan telah mencapai seratus persen.

■ Baca Rampung.. Hal 3

Catatan **DAHLAN ISKAN**

Semedi Keriting

"MAAF, saya lagi semedi, Pak."

"Tidak mau menjawab kesimpulan diskusi itu?" tanya saya lagi.

"Saya lagi semedi."

"Sampai kapan? Sampai keritingnya lurus?"



"Pantang lurus!"

Itulah dialog saya dengan Si Cantik Rambut Keriting, Si Perintis Terapi aaPRP, Si Ahli Bedah Plastik,

Si Ahli Terapi Stem Cell, Si Pemilik Nama Satu Kata: Karina.

■ Baca Semedi.. Hal 2

Kasus Corona di Kaltim jadi Sorotan Dunia

JAKARTA-Tingginya angka kematian akibat Corona di Kalimantan Timur menjadi sorotan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kaltim menjadi salah satu dari 7 Provinsi yang di Indonesia dengan laju penularan tinggi sepanjang 2 sampai 8 Agustus 2021. Laju penularan itu dihitung per 100 ribu penduduk.

Laju penularan tertinggi pertama yang

disoroti WHO adalah Kalimantan Utara. Insiden kasus di daerah ini mencapai 413,9 per 100 ribu penduduk. Lalu, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan insiden kasus 334,8 per 100 ribu penduduk.

Daerah ketiga dengan laju penularan tertinggi selanjutnya yaitu Kalimantan Timur dengan insiden kasus 316,8 per 100 ribu penduduk. Kepulauan Bangka

Belitung dengan insiden kasus 271,2 per 100 ribu penduduk, DKI Jakarta 252,9 insiden kasus per 100 ribu penduduk.

Selanjutnya ada Bali dengan insiden kasus 196,3 per 100 ribu penduduk dan Kepulauan Riau sebanyak 171,1 per 100 penduduk.

Data itu dituliskan dalam laporan mingguan WHO yang dikeluarkan pada

11 Agustus 2021.

Pada Jumat (13/8), kasus COVID-19 di tanah air kembali naik dengan tambahan pasien baru 30.788 orang. Kementerian Kesehatan mencatat pada Jumat (13/8) jumlah kasus mencapai 3.804.943 orang.

■ Baca Kasus..Hal 3



SEMEDİ

Sambungan halaman 1

Berarti Dr dr Karina tidak mau memberikan penjelasan terbuka soal yang lagi beredar luas di medsos: hasil diskusi pengurus pusat Perapi (Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika Indonesia) 6 Agustus lalu.

Dalam kesimpulan nomor 1 diskusi tersebut disertakan pendapat Prof D dr Rahayuningsih, pakar hemostasis, trombosit, dan komponennya.

Menurut Prof Rahayu, di dalam trombosit tidak ada kandungan *growth factor*. Kalimat utuh di kesimpulan itu –karena agak panjang tariklah napas dulu: “trombosit tidak menghasilkan *growth factor* dan sitokin sendiri karena tidak mempunyai inti sel, melainkan dapat dari plasma yang masuk ke dalam celah *granula alfa* di dalam trombosit.

Jadi bila pasien dalam keadaan badai sitokin maka sitokin banyak tersimpan dalam trombosit yang bila dipecah maka akan keluar dalam pembuluh darah. Trombosit menyerap plasma yang mengandung *growth factor*, *platelet plaque*, adhesi, agregasi, *release granula alfa* PF 4, dan bTG yang dapat menetralkan heparin.

Juga pencetus Inflamasi CD40L PF4 dan bTG CD40 dapat menyebabkan TRALI (*transfusion related acute lung injury*) PF 4 ada di *granula alfa* akan berikatan dengan heparin. Kompleks akan merangsang antibodi terbentuk kompleks ag-ab, terjadi heparin *induced thrombopenia* (komplikasi thrombosis dari vaksin AstraZeneca)

Di khawatirkan bila trombosit dipecah maka efek sitokin dan inhibisi heparin semakin besar yang dapat menimbulkan trombosis.

Walaupun dalam aaPRP sudah disaring dan tidak terdapat sel trombosit, tetapi isi dari trombosit yang akan memperberat trombosis”.

Embuskanlah napas sebelum meneruskan membaca *Disway* berikut ini.

Berarti klaim Karina terbantahkan secara telak oleh pendapat Prof Rahayu tersebut.

Padahal dalam tesisnya, Karina tegas-tegas mengatakan: di dalam trombosit terkandung lebih 1000 jenis protein. Yang kalau dikelompokkan terdiri dari tiga golongan besar: anti radang, anti virus, dan faktor penumbuh cell (*growth factor*).

Berangkat dari pemikiran itulah Karina mencoba protein yang sudah

dibuang “kulitnya” itu untuk terapi COVID-19. Dengan cara diinfuskan ke pasien –dari darah pasien sendiri.

Begitu bertolak belakang pendapat itu. Dari kesimpulan diskusi yang beredar luas itu, di mata publik, nama Karina langsung jatuh terkulai.

Untung Karina sudah sering dijatuhkan seperti itu. Sejak dia mempraktikkan terapi *stem cell*. Juga ketika Karina menjalankan terapi PRP. Karina kali ini cukup menghadapi itu dengan cara Jawa-nyi: semedi. Tiarap.

Tapi publik tentu perlu tahu mana yang benar. Mungkin tunggu Karina selesai semedi.

Saya juga mendapat kiriman “kesimpulan diskusi” tersebut. Bahkan tidak hanya dari satu pengirim. Saya mendapat kiriman dari berbagai jurusan. Saya baca berulang kali kiriman itu. Saya pun membaca ulang tiga tulisan saya soal Karina: siapa tahu ada yang salah.

Dari yang beredar di medsos itu memang kurang jelas: itu notulensi diskusi atau keputusan rapat. Dari judul undangannya jelas: diskusi ahli. Tujuannya juga bagus dan simpatik: untuk penyempurnaan penelitian aaPRP.

Tapi kesimpulan yang beredar di medsos itu seperti keputusan sebuah rapat. Sama sekali tidak disebut di situ apa pendapat Dr dr Karina. Padahal Karina disebut hadir di diskusi tersebut.

Setelah membaca ulang *Disway*, tentang Karina saya memang merasa kurang cermat di satu hal: tidak menyebutkan ini. Ketika pasien menerima terapi aaPRP tetap mendapat obat yang lain. Terapi aaPRP bukan satu-satunya yang diberikan kepada si pasien saat itu.

Tapi ternyata saya juga sudah menulis: penelitian aaPRP Karina itu sudah dilakukan dengan kontrol. Yakni pasien penelitian dibagi dua. Satu kelompok diberi obat plus aaPRP. Satu kelompok lagi diberi obat tanpa tambahan aaPRP.

Berarti secara tidak langsung saya sudah menyebutkan aaPRP bukan terapi tunggal. Berarti tidak ada yang saya sebut kurang cermat tadi.

Dan lagi naskah yang beredar luas di medsos itu memang tidak mempersoalkan *Disway*. Saya saja yang bersikap ingin mendahulukan introspeksi: jangan-jangan ada yang salah di tulisan itu –secara jurnalistik.

Kelihatannya diskusi itu sendiri hanya mempersoalkan Karina. Dianggap *over klaim*. Karina juga

dipersalahkan terlalu terburu-buru mengungkapkan hasil penelitiannya. Itu dianggap melanggar etika Perapi.

Setelah melakukan introspeksi di atas, barulah saya kontak Karina. Saya ingin tahu tanggapan Karina. Juga ingin bertanya: apa saja yang dia ucapkan di diskusi tersebut.

Apakah Karina tetap pada pendapatnya? Atau mengaku salah? Mengakui Prof Rahayu yang benar –bahwa di dalam trombosit tidak terdapat protein penumbuh?

“Baiknya saya semedi saja dulu. Saya ini lebih muda. Harus menghormati senior,” ujar Karina.

Saya memuji sikap Karina yang tidak konfrontatif. Padahal harusnya dia emosi. Bayangkan, nama Karina langsung jatuh di mata publik. Sikap semedi Karina itu saya nilai sebagai bentuk pengorbanan yang luar biasa besar dari seorang peneliti.

Apalagi Karina adalah salah satu mahasiswi Prof Rahayu (kini 74 tahun) di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Saya pun menghormati Karina yang lagi semedi. Saya tidak memprovokasi dia untuk melawan. Asal, itu tadi, janganlah Karina terlalu ‘dalam’ bersemedi yang sampai membuat keritingnya menjadi lurus.

Apakah akibat kesimpulan diskusi yang beredar luas di medsos itu permintaan terapi aaPRP langsung berhenti?

“Rumah sakit yang minta kerja sama tambah banyak,” ujar Karina. Tapi banyak juga dokter yang tidak menyetujui permintaan pasien untuk menjalani terapi aaPRP. Dengan alasan: menunggu hasil uji coba tahap 3.

Di tengah menghadapi persoalan itu, Karina kaget: Wakil Ketua DPR Dr Ir Sufmi Dasco Ahmad, tiba-tiba ke laboratorium Hayandra milik Karina. Senin lalu. Dasco adalah juga ketua tim penanganan COVID-19 DPR.

Di HayandraLab, Dasco langsung membuat pernyataan mendukung Karina. Karina tersipu-sipu. Apalagi, di situ juga, Dasco langsung menelepon Menteri Kesehatan Budi Sadikin. Lalu menyerahkan HP itu ke Karina agar bicara sendiri dengan Menkes.

Karina kaget kok tiba-tiba harus bicara dengan Menkes. Kebetulan Juni lalu Karina sudah kirim surat ke Kemenkes. Minta dukungan agar aaPRP dilihat sebagai salah satu cara menangani COVID-19.

Belum lama Karina bicara, HP itu diminta lagi oleh Dasco. Harusnya Karina jangan mengembalikan HP itu –bawa saja lari, itu HP baru yang mahal. ***/YOS**



BUPATI Berau Sri Juniarsih saat penyerahan 5 ton beras untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak COVID-19 melalui Dinas Pangan Berau, Kamis (12/8).

BOLEH TAPI TERBATAS

TANJUNG REDEB – Pembelajaran tatap muka (PTM) diperbolehkan dilaksanakan di wilayah Pembelajaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1-3. Dengan catatan, dilaksanakan secara terbatas dan seizin orang tua murid.

Ketentuan itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri dengan Nomor 03/KB/2021, Nomor 384/2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.

Ketua Satgas Berau, Sri Juniarsih mengatakan, kendati PTM terbatas dapat dilaksanakan di Kabupaten Berau, tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) super ketat. “Ada lima ketentuan yang diatur dalam SKB empat menteri terkait penerapan protokol kesehatan. Karena anak-anak cukup rentan,” katanya kepada *Disway* Berau, Jumat (13/8).

Pertama, lanjut Sri, kondisi kelas dalam satuan pendidikan SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI dan pro-

gram kesetaraan harus memperhatikan jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Atau maksimal 50 persen dari kapasitas.

Selanjutnya, tingkat SDLB, MILB, SMP, MTsLB dan SMLB, MALB juga harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan lima peserta didik per kelas, atau maksimal 62 persen.

“Sementara, PAUD minimal 1,5 meter dengan lima peserta didik per kelas atau maksimal 33 persen,” jelasnya.

Yang kedua, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar atau shift yang ditentukan oleh satuan pendidikan, dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan satuan pendidikan.

“Poin ketiga, wajib menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*), menjaga jarak meter dan tidak melakukan kontak fisik, serta menerapkan etika batuk atau bersin,”

bebernyanya.

Sedangkan poin keempat, terkait kondisi medis satuan pendidikan. Di mana harus dalam kondisi sehat dalam menjalankan PTM terbatas. Jika mengidap penyakit penyerta (Komorbid), juga harus dalam kondisi terkontrol. Terutama, tidak memiliki gejala COVID-19. Termasuk orang yang serumah dengan satuan pendidikan.

“Terakhir, kegiatan berpotensi menjadi kerumunan tidak diperbolehkan di satuan pendidikan. Seperti ke kantin, olahraga dan sebagainya,” jelasnya.

Sri menambahkan, bagaimana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 berlangsung secara dinamis, menyesuaikan risiko kesehatan dan keselamatan masing-masing wilayah atau kecamatan. Sekolah wajib menyediakan opsi pembelajaran terbatas atau jarak jauh.

“Orang tua atau wali memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih dua opsi itu. Serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik memilih PJJ,” pungkasnya. ***ZUH/JUN**

PEMIMPIN

Sambungan halaman 1

Termasuk dalam acara-acara bersifat seremonial.

Puncaknya, AGM melaporkan Hamdam atas tuduhan penyalahgunaan wewenang. Politikus Demokrat itu mengadukan Hamdam ke Inspektorat Provinsi pada Juni 2021. Hamdam kemudian diperiksa pada 30 Juli 2021 di Balikpapan.

Pengamat Politik dan Pemerintahan, Budiman, menilai peristiwa itu sebagai gelagat politik yang kurang baik. Permasalahan itu, seharusnya bisa diselesaikan secara internal, sebelum dilanjutkan pada tahap pelaporan.

Bahkan jika perlu diselesaikan secara damai. Terkecuali, lanjut Budiman, ada maksud atau motif lain dari peristiwa pelaporan tersebut. Misalnya, ingin memberikan pelajaran. “Cuma indikasinya secara politik bisa mengarah pada pembunuhan karakter,” sebutnya.

“Dari sisi politik, biasanya konflik seperti ini disebabkan persoalan adanya pihak yang tidak terakomodir kepentingannya,” ucap Budiman, Jumat (13/8). Akademisi Universitas

Mulawarman, itu membaca adanya semacam gelagat yang mengarah pada konflik kepentingan di internal pemerintahan.

Secara teknis, bilang dia, naskah dinas yang dikeluarkan wakil bupati semestinya sudah diperiksa oleh staf sebelum ditandatangani.

Sebab, biasanya setiap keputusan yang dikeluarkan itu ada paraf dari bawahan, “artinya sudah diperiksa sebelum ditandatangani,” tandas dia.

Pengamat lainnya, Nasrullah berpandangan bahwa terbukanya persoalan tersebut menggambarkan buruknya budaya organisasi di tataran eksekutif PPU.

“Tentu hal tersebut kurang baik dari segi budaya organisasi, lebih khusus lagi budaya Pemerintahan,” katanya kemarin.

Bagaimanapun, menurut Nasrullah, kepala daerah dan wakilnya mesti menunjukkan sikap dewasa sebagai pemimpin.

Persoalan di internal, sepiantasnya dibicarakan dan diselesaikan secara bersama dan tidak sampai keluar. Ke publik. Apalagi kalau kejadian-nya sampai atasan melaporkan bawahan.

Pemimpin yang baik, kata dia, adalah pemimpin yang mampu mengayomi dan melindungi bawahannya. “Publik dan rakyat bisa menilai kedewasaan seorang pemimpin dari caranya mengelola pemerintahan dan memperlakukan bawahannya,” pungkas pengajar Ilmu Budaya itu.

Terkait perkembangan laporan itu, Kepala Inspektorat Kaltim, Irfan Pranata enggan membeberkan hasil pemeriksaan. Ia mengatakan, hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.

Terkait laporan atasannya kepada pengawas, Hamdam Pongrewa mengaku kaget. “Hubungan saya, saya selama ini merasa biasa-biasa saja. Artinya, secara pribadi selalu berinteraksi. Biasa saja,” ujarnya, Kamis (12/8).

“Sebenarnya saya, ya agak-agak kaget juga,” tukasnya. Apalagi laporan itu datang tanpa ada aba-aba. Tak pernah ada teguran yang pernah ia terima atas dugaan yang disangkakan.

“Tidak ada, saya pikir *fine-fine* saja. Karena tidak pernah ada komplain beliau soal apa yang pernah saya lakukan,

yang langsung (disampaikan) ke saya. Tidak tahu jika lewat staf, dan staf tidak menyampaikan ke saya. Tapi tidak ada saya pernah dengar,” bebernya.

Meski begitu, Hamdam tak berpikir macam-macam. Ia masih berprasangka baik pada atasannya itu. “Ini dalam rangka menertibkan administrasi pemerintahan saja,” sebutnya.

Termasuk adanya maksud-maksud yang tersirat soal kepentingan politik dan sebagainya. “Ah, tidak ada muatan lain. Terlalu jauh itu,” sanggahnya.

DITUDUH MENYALAHGUNAKAN WEWENANG

AGM melaporkan Hamdam atas dugaan penyalahgunaan wewenang ke Inspektorat Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam suratnya dengan nomor 005/755/TU-Pimp/VI/2021 tersebut, dugaannya terkait penertiban tata naskah dinas. Diketahui, surat itu dikirimkan Juli lalu. Adapun Inspektorat Kaltim yang menerima aduan langsung bertindak. Diawali dengan pembentukan tim pemeriksa.

Surat Perintah Tugas kelu-

ar. Menunjuk sepuluh personel inspektorat untuk menjalankan pemeriksaan mulai 26 Juli-4 Agustus. Penunjukan itu ditandatangani Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

“Ada dugaan penerbitan naskah dinas yang tidak sesuai dengan aturan dan dilakukan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, makanya kami lakukan pemeriksaan,” kata Kepala Inspektorat Kaltim, Irfan Pranata.

Adapun pemanggilan pada Hamdam baru dilakukan pada 30 Juli lalu. Hasil pemeriksaan itu akan dilaporkan ke Gubernur atau Wakil Gubernur Kaltim. Kedua pimpinan Pemrov Kaltim ini yang akan menindaklanjuti langkah berikutnya.

“Gubernur dan Wakil ini kan perwakilan pemerintah pusat di daerah, jadi nanti coba kami tengah masalahnya apa. Menunggu hasil pemeriksaan saja,” ujarnya.

Meski begitu, Irfan tak membuka soal hasil pemeriksaannya. Yang bertempat di sebuah hotel di Balikpapan. “Saya memang minta diperiksa di tempat yang netral, agar tidak ada interpretasi macam-macam,” kata Hamdam.

Adapun perihal yang disang-

kakan, ia merasa tak pernah melakukannya. Sepanjang ia mewakili orang nomor satu di PPU itu, Hamdam selalu melakukan hal yang menurutnya benar. Termasuk dalam urusan penerbitan naskah-naskah dinas. “Sepanjang saya pahami, yang saya lakukan itu sudah prosedural. Tidak pernah juga ada juga teguran-teguran ke saya,” ucapnya.

Sudah satu kali diperiksa, Hamdam menyatakan siap untuk terus mengikuti arahan inspektorat hingga urusan selesai. Ia menyatakan akan selalu kooperatif.

“Pertanyaan terakhir dari mereka: apakah bersedia jika diperiksa kembali? Saya jawab: Siap jika ada informasi yang masih mau didalami,” tegasnya.

AGM dan Hamdam berpasangan saat maju sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati PPU pada Pilkada 2018. Keluar sebagai pemenang, mengalahkan lawannya kala itu, pasangan Andi Harahap-Fadly Imanwan dan Mustaqim MZ-Sofian Nur.

AGM sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan itu memang sudah sejak setahun sebelumnya sudah berkoar. Me-

negaskan akan menggandeng Hamdam yang kala itu masih menjabat Ketua DPD II Partai Amanat Nasional (PAN).

Koalisi Demokrat-PAN akhirnya terbentuk. Saat itu cukup untuk mengusung pasangan calon dalam Pilkada PPU. Di depan puluhan masyarakat Kelurahan Nipah-Nipah, Sabtu (14/10/2017) malam, AGM umumkan juga ada dukungan dari Partai Golkar, Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Terkait ‘kisruh’ antara kepala daerah dan wakilnya, anggota Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) PPU, Zaenal Arifin mengaku belum pernah mendapat ifnormasi dari Hamdam. “Pak Hamdam belum pernah komunikasi masalah ini dengan PAN,” sebutnya.

Zaenal berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan agar tak mengganggu jalannya pemerintahan. “Saya kira ini keburuan komunikasi dan sebaiknya perihal ini diakhiri saja. Kan tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Saya rasa ini bisa dibicarakan internal,” tutupnya. ***DAS/RSY/ZUL/YOS**

DIS KALTIM
Spirit Akal Sehat
PT. Dinamika Indonesia Semesta (DIS)

Pembina Dahlan Iskan
Penasihat Zainal Muttaqin
Komisaris Chrisna Endrawijaya
Direktur Utama Devi Alamsyah
Direktur Unit Bisnis Rachman Ainul Muttaqin
Direktur Percetakan Mohamad Salahuddin SH MH

Divisi Legal Mohamad Salahuddin SH MH

Penanggungjawab (Pemimpin Redaksi) Yoyok Setiyono

Staf Redaksi Benny Oktariyanto, Hairudin, Yulius Samuel Laurens, Ferry Cahyanti, Muhamad Zulfikar Akbar, Sandi Kurniawan

Kutim: Eko Muchlis Huda. Tenggarong: Bayu Surya, M Rafii

Penajam Paser Utara: Robbi Nur Syai'an

Divisi Kreatif Fuad Wibowo, Febri Iskandar, Putri Rahimah Mughny

Manajer Pemasaran Zulkiflian Nur

Divisi Iklan Samarinda: Toni Hariyadi, Topan. Balikpapan: Sandi Kurniawan, Chehob R Helmi.

IT Web: Kusuma

Koord. Cetak Hariyanto

Alamat Percetakan PT. Dinamika Indonesia Semesta, PLTU - Embalut Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara, Kaltim Telp. (0542) 74843

● Contact : 0542 - 8520236 Email Redaksi: diskaltim@gmail.com Email Kantor: kalimantanmediadis@gmail.com

Alamat Redaksi:

Balikpapan
Kompleks Ruko Maple Blok A 6
Borneo Paradiso, Balikpapan Timur

Samarinda
Jl. Untung Suropati Ruko Mahakam
Square Blok B Nomor 10, Karang Asam
Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Samarinda